

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas apa yang ditemukan dilapangan mengenai penelitian tentang”Peran Elit Politik Dalam Koalisi Partai Aceh dan Partai Gerinda Pada Pemilu Presiden Tahun 2014”, data yang digunakan adalah data primer, data primer disini yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak terkait tentang keputusan yang dilakukan antara kedua partai. Walaupun antara masyarakat aceh dan pemimpin pusat Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto mempunyai masalah sejarah, tetapi Partai Aceh tetap melakukan koalisi dengan Partai Gerindra dengan harapan hal-hal penting di Aceh akan direalisasikan apabila Partai Gerindra memimpin. Hal yang dilakukan oleh Partai Aceh adalah hal yang sangat bagus, dimana Partai Aceh melihat peluang yang besar jika presiden berasal dari Partai Gerindra, yaitu UUPA Aceh yang belum berjalan dengan semestinya akan diberikan kewenangan sepenuhnya jika Prabowo menjadi presiden, dan dari Partai Gerindra juga melihat peluang yang besar jika hal ini yang dijanjikan kepada masyarakat Aceh dan khususnya kepada Partai Aceh.

Berkoalisi dengan Partai Gerindra bukan tanpa halangan, banyaknya yang menfitnah Partai Aceh mendapatkan dana yang besar dari Partai Gerindra. Untuk lebih jelas apakah koalisi tersebut berhasil dan mendapatkan restu keseluruhan dari pengurus Partai Aceh, maka dibab ini akan dibahas seluruhnya.

A. Peran Partai Gerindra dalam Koalisi dengan Partai Aceh

Menurut Sarwono dalam Cahyono (2008) Teori peran (*Role Theory*) adalah perpaduan antara teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Kemudian digunakan dalam ilmu sosiologi dan psikologi serta antropologi. Jika dilihat dalam dunia teater, aktor akan bermain sebagai tokoh tertentu dan diharapkan dapat melakukan seperti kondisi dan perilaku tertentu. Kemudian aktor diposisikan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya posisi masyarakat seperti dalam teater. Dalam keadaan ini dapat dilihat perilaku yang diharapkan tidak dapat berdiri sendiri karena berada pada kondisi yang saling berkaitan dengan yang lainnya (aktor lain).

Setelah dilakukan penelitian Partai Gerindra berjanji akan menyelesaikan permasalahan UU PA dimana UU ini belum bisa diimplementasikan secara keseluruhan karena pemerintah pusat belum memberikan ruang yang bebas untuk mengekspresikan UU tersebut. Sehingga peran dari Partai Gerindra diharapkan jika nanti menang dan menjadi Presiden diharapkan akan memberikan ruang untuk masyarakat Aceh demi mewujudkan UU PA secara keseluruhan, adapun cara untuk memahami peran yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu:

1. Alat untuk memenangkan kandidat yang diusung oleh partai.

Berbicara mengenai alat partai berarti kita membahas tentang kinerja mesin partai dari kedua partai, apakah mesin partai berjalan dengan baik atau terjadi masalah didalam mesin partai itu sendiri. Mesin partai yang dimaksud disini adalah kader dan pengurus dari

tingkat teratas sampai terbawah yang berada di Aceh utara. Masalah didalam mesin Partai Aceh dan Gerindra di Aceh Utara tidak ada masalah internal yang ada adalah masalah eksternal.

Permasalahan eksternal yang terjadi adalah ketua umum Partai Aceh digosipkan menerima uang dari Partai Gerindra sehingga mau berkoalisi dengan Partai Gerindra. Mesin partai yang berada di Aceh Utara berjalan dengan baik bisa terlihat pasangan Prabowo dan Hatta berhasil memenangkan pilpres di Aceh utara. Dari data Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh di Aceh Utara pasangan Presiden Prabowo dan Hatta berhasil mengungguli pasangan Jokowi dan JK, di Aceh Utara Prabowo mendapatkan suara sebanyak 125.359 sedangkan Jokowi mendapatkan perolehan suara sebesar 82.486, Prabowo berhasil menang di 17 kabupaten/kota dan Jokowi hanya berhasil menang di 7 kabupaten/kota.

Selain permasalahan yang diatas masih ada satu permasalahan yang cukup berat, yaitu pasangan dari Gerindra mempunyai sejarah yang tidak baik dengan rakyat Aceh, diduga Prabowo menjadi pemimpin pelanggaran HAM yang terjadi di Simpang KKA. Peneliti menanyakan bagaimana cara mesin partai bermain untuk bisa meyakinkan bahwa Prabowo tidaklah terlibat. Mantan ketua umum Partai Gerindra mengatakan, ”dugaan terhadap Prabowo yang memimpin tragedi Simpang KKA membuat kami Partai Gerindra

harus lebih bekerja keras, untuk bagaimana meyakinkan pemilih bahwasannya bahwa Prabowo tidak terlibat.

Ketua umum Partai Aceh adalah elit yang sangat berpengaruh didalam koalisi antar Partai Aceh dan Partai Gerindra, sepak terjang dari Muzakkir Manaf di Aceh tidak perlu diragukan, Muzakkir adalah salah satu mantan petinggi GAM saat pemberontakan yang terjadi di Aceh pada 1970 an yang di pimpin oleh Hasan Tiro. Hal ini sungguh menguntungkan untuk Partai Gerindra karena Muzakkir sangat berpengaruh didalam dunia perpolitikan di Aceh, tetapi Muzakkir tidak begitu saja menerima pinangan dari Partai Gerindra. Partai Gerindra mengetahui semua ini oleh sebab itu perjanjian politik yang diberikan juga sangat menggiurkan, perjanjian politik tersebut akan di perjelas pada subtema yang selanjutnya, dalam berkoalisi melihat apa yang diberikan oleh Partai Gerindra sangat menguntungkan Partai Aceh dan juga rakyat Aceh. Yaitu memberikan UU PA sepenuhnya untuk Aceh dan juga memberikan kesempatan bagi kader Partai Aceh yang ingin menjadi anggota DPR. Dengan power yang dimiliki oleh Muzakkir tidak terlalu sulit untuk menyatukan pandangan untuk mengukung Prabowo, tidak ada pengurus partai yang menolak untuk bergabung dengan Partai Gerindra.

TA Khaled adalah ketua dari Partai Gerindra beliau adalah teman diskusi Muzakkir, melihat kedekatan ini sudah pasti koalisi ini akan

berjalan dengan lancar, bedanya TA Khaled tidaklah begitu terkenal dikalangan masyarakat Aceh.

Mesin patai membuat doktrin Prabowo lebih tegas dari pada Jokowi sehingga Prabowo lebih pantas menjadi Presiden, mesin partai memulai doktrin ini dari lingkungan yang lebih kecil yaitu keluarga, setelah itu kerabat dekat, dan barulah jika dua komponen ini sudah kuat maka keluarga dan kerabat dekat akan juga ikut membantu berkampanye, tentu hal ini sangat menguntungkan jika satu kader mempunyai lima orang dalam satu keluarga yang bisa memilih ini sangat lumayan untuk menjadi lumbung suara, dan dari lima orang yang bisa memilih itu mempunyai lingkungan yang berbeda, setiap orang tersebut bisa dipastikan mempunyai teman yang berbeda-beda, dan tugas dari lima orang tersebut harus bisa meyakinkan lingkungan bermainnya bahwa Prabowo lebih baik dari Jokowi.

Pemilu Presiden merupakan pesta demokrasi, di Indonesia atau yang dikenal dengan pemilihan umum baik ditingkat daerah atau tingkat pemerintahan pusat sangat sering partai-partai politik melakukan koalisi. Koalisi yang dilakukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenangkan pemilu, hal ini juga yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan Partai Aceh untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden, Partai Aceh pada pemilu gubernur tahun 2012 dibantu oleh Gerindra untuk memenangkan persaingan merebut kursi

Gubernur di Aceh, persaingan ini dimenangkan oleh Partai Aceh, Dr Zaini Abdullah mantan menteri luar negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi gubernur dan Muzakir Manaf mantan Panglima GAM sebagai wakil gubernur terpilih dalam pilkada Aceh 9 April 2012 lalu, Selasa (17/4) KIP Aceh, pasangan Zaini dan Muzakir resmi ditetapkan sebagai pemenang, perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan Zaini muzakir adalah 1.327.695 atau (55,75%) sekaligus dikukuhkan menjadi gubernur definitive periode 2012-2017 oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), maka mulai dari sini Partai Aceh dan Partai Gerindra memulai pertemanan.

Merasa sudah dekat dengan Partai Aceh kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Gerindra, Partai Gerindra meminta bantuan kepada Partai Aceh atau yang biasa disebut berkoalisi, Partai Aceh menerima untuk membantu dalam pemilu Presiden tahun 2014, walaupun Partai Aceh tau hal ini tidak mudah karena masyarakat Aceh mempunyai sejarah yang tidak baik dengan calon yang diusung oleh Partai Gerindra yaitu Prabowo, kasus yang paling diingat oleh rakyat Aceh adalah kasus pelanggaran HAM simpang KKA. Sedangkan cawapres dari Jokowi adalah Jusuf Kalla sebagai orang yang berjasa dalam penyelesaian konflik antara GAM dan Pemerintah pusat.

Dari peta politik seharusnya pasangan Jokowi-JK seharusnya bisa menang dengan mudah karena pak JK mempunyai sejarah yang cukup baik dengan Aceh, tetapi sayangnya hal ini jauh dari yang dibayangkan

karena Pak Prabowo memenangkan pemilu Presiden di Aceh. Ada beberapa spekulasi kenapa pasangan Jokowi-Jk kalah yaitu pasangan ini naik dari PDI-P dimana masyarakat Aceh juga mempunyai sejarah yang tidak baik pada masa pemerintahan Megawati, dan satu lagi alasan kenapa pasangan Jokowi-Jk bisa kalah yaitu masyarakat Aceh lebih menyukai pemimpin yang tegas sehingga beberapa dari masyarakat Aceh tidak melihat ini ada didalan diri pak Jokowi.

Dari 45 anggota DPRK Gerinda hanya memiliki satu calon yang berhasil menjadi anggota DPRK, sedangkan dari Partai Aceh mendapatkan DPRK sebanyak 24 kursi. Jika dilihat koalisi ini tidaklah menguntungkan Partai Aceh karena suara Gerindra di DPRK tidak membantu Partai Aceh. Melihat peta politik yang begitu menguntungkan Partai Gerindra sulit dipercaya koalisi ini bukan karena kepentingan kelompok, peneliti rasa berita dari media online yang mengatakan Partai Aceh mendapat sumbangan dana dari Prabowo sebesar 50 M ada benarnya.

Dari kedua pasangan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dimata masyarakat Aceh, sehingga persaingan sangat ketat sampai akhirnya pasangan Prabowo dan Hatta memenangkan pilpres di Aceh, kemenangan yang diraih tidaklah terlalu besar yaitu hanya menang sekitar 5,61% dari lawan politiknya yaitu Jokowi dari PDI-P.

Mesin partai di Aceh Utara berjalan dengan baik karena walaupun ada dua isu yang dilemparkan kepada Partai dan calon yang diusung,

mesin partai dengan sigap bisa meyakinkan masyarakat bahwa berita yang beredar itu tidak benar, dan resolusi konflik yang dilakukan mesin partai terhadap isu ketua umum Partai Aceh menerima uang dari Prabowo segera ditepis oleh ketua umum sendiri, syukurnya rakyat aceh masih mempunyai kepercayaan kepada Muzakir. Dari data Komisi Independen Pemilihan (KIP), untuk Aceh Utara Prabowo memperoleh suara sebanyak 125.359 sedangkan Jokowi mendapatkan perolehan suara sebesar 82.486. dilihat dari perolehan suara mesin partai berjalan dengan baik karena berhasil merebut suara lebih besar dari pada pasangan Jokowi-JK.

2. Berkoalisi karena ideologi yang sama.

Partai Gerindra dan Partai Aceh bukan koalisi dikarenakan mempunyai ideologi yang sama, ideologi Partai Gerindra adalah Pancasila sedangkan Partai Aceh adalah Partai lokal yang lebih fokus kepada permasalahan Aceh saja. Dari segi ideologi partai memang kedua partai tersebut tidaklah sama, tetapi visi dan misi dari kedua partai ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama ingin menyejahterakan rakyat Aceh dalam semangat negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut peneliti koalisi yang dilakukan selain karena kesamaan visi dan misi, ada hal yang lebih penting yaitu koalisi ini terjalin karena adanya kepentingan yang sama, ada keuntungan yang didapatkan dikedua belah pihak, seperti yang sudah dijelaskan diatas salah satu keuntungan jika Partai Aceh membantu Partai Gerindra

untuk menjadikan Prabowo sebagai Presiden maka pemerintah Aceh bebas menjalankan UU PA, walaupun mantan ketua Partai Gerindra mengatakan saat wawancara, “keuntungan mengenai UU PA juga dirasakan oleh rakyat Aceh”, tetapi peneliti menganggap ini juga akan lebih menguntungkan elit politi Partai Aceh dimana masih banyak pemerintah daerah di Aceh dari kader Partai Aceh dan Gubernur juga pada saat itu dari Partai Aceh, selain UU PA Partai Aceh juga mendapatkan kemudahan karena untuk kader Partai Aceh yang ingin membangun Aceh dari DPR-RI bisa melalui Partai Gerindra, sedangkan keuntungan bagi Partai Gerindra yaitu bisa memenangkan pilpres di Aceh dan pamor Partai Gerindra akan lebih banyak dikenal oleh masyarakat Aceh.

Ada hal yang menarik didalam pemilu legislative di provinsi Aceh, ternyata koalisi ini juga berpengaruh didalam legislative, Partai Gerindra yang sebelumnya hanya 5 orang saja diseluruh daerah Aceh, yaitu hanya ada didaerah Langsa, Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Pada pemilu legislative 2014 terjadi kenaikan yang sangat menguntungkan bagi Partai Gerindra tetapi hal ini tidak terjadi Partai Aceh, jumlah kursi yang didapat oleh calon legislative Partai Gerindra yaitu sebesar 38 kursi dari 19 kabupaten/kota di Aceh.

Keuntungan yang didapatkan Partai Gerindra pada pemilu legislative pada tahun 2014, membuat hubungan koalisi antar kedua

partai ini sempat dikabarkan renggang. Bagaimana tidak Partai Aceh yang menargetkan bisa mendapatkan kursi sebanyak 35 kursi di DPR Aceh namun nyatanya hal ini tidak tercapai, Partai Aceh hanya memperoleh 29 kursi dari 81 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang didapatkan oleh Partai Aceh berkurang dari sebelumnya, pada pemilu legislative tahun 2009 Partai Aceh mendapat 33 kursi dari 69 kursi di DPR Aceh.

Keadaan ini yang diduga membuat hubungan koalisi antara Partai Aceh dengan Partai Gerindra terjadi gejolak, gejolak ini menjadi kan hubungan koalisi pemilu presiden tahun 2014 akan batal. Namun melihat berita yang beredar begitu cepat ketua umum Partai Aceh tidak tinggal diam, Mualem menjawab pernyataan yang dikabarkan semua hal yang dikabarkan itu tidaklah benar, Partai Aceh dan Partai Gerindra masih tetap berkoalisi untuk pemilu Presiden tahun 2014.

Walaupun Mualem mengatakan hubungan kedua partai masih baik-baik saja, bukan berarti calon legislative yang memenangkan pemilu legislative dengan usaha sendiri menerima begitu saja. Dilansir dari berita online TribunNews situasi yang tidak harmonis terjadi karena pernyataan yang beredar yaitu, “anggota DPRA dan DPRK dari Partai Aceh disebut anak haram, karena pada pemilu legislative pemimpin Gerindra yang di Aceh menghimbau simpatisannya untuk memilih caleg dari Partai Aceh bukan dari Gerindra,” kata seorang sumber dari satu partai lokal di Aceh.

Ada beberapa faktor yang memungkinkan Partai Gerindra bisa mendapatkan kursi lebih banyak dari pemilu tahun 2009, pertama usaha dari calon legislatif yang diusung oleh Partai Gerindra, usaha dari caleg Partai Aceh bisa jadi tidak sekeras dari caleg Partai Gerindra, kedua timses yang dimiliki Partai Gerindra dengan timses yang dimiliki tidak mempunyai kapasitas yang sama, kemungkinan timses yang dimiliki Partai Aceh tidak memiliki kapasitas dibidang tersebut oleh sebab itu Partai Aceh tidak mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan timses dari Partai Gerindra mempunyai mesin partai yang bagus, sehingga timses sangat mengerti apa yang harus dilakukan agar bisa memenangkan calon yang diusung, dan yang terakhir dana kampanye tidak diragukan lagi Partai Gerindra mempunyai dana yang tidak sedikit yaitu dana untuk partai didapatkan dari negara dan dari pengusaha yang menjadi anggota partai, bahkan ketua umum Partai Gerindra sendiri adalah pengusaha yang terkenal dan sukses.

Melihat begitu banyak permasalahan yang terjadi adalah hal yang biasa, selama ketua partai mampu menerapkan manajemen konflik secara benar tidak akan menjadi masalah yang serius, dalam berkoalisi selalu ada pro dan kontra seperti koalisi yang dilakukan oleh Partai Aceh dan Partai Gerindra, berita online di Aceh memberitakan ada anggota Partai Aceh yang tidak setuju dengan koalisi tersebut, karena ketua umum Partai Aceh belum membuka pembicaraan dengan kader-

kader Partai Aceh didaerah, dan juga ketua umum Partai Aceh dikabarkan menerima uang dari Prabowo sebesar 50 M.

Ideologi dari kedua partai tidak sama tetapi ada dua hal yang sama yaitu visi dan misi partai, dan yang kedua adalah kepentingan, kepentingan dari Partai Aceh yaitu jika Prabowo menjadi Presiden maka UU PA akan diberikan secara keseluruhan, dan kader Partai Aceh bisa naik ke DPR-RI dari Partai Gerindra, sedangkan kepentingan dari Partai Gerindra adalah memenangkan Prabowo, dan yang kedua kepentingannya adalah mengenalkan kepada masyarakat Aceh bahwa Partai Gerindra adalah partai yang pro kepada rakyat Aceh, sehingga mengharapkan kader Partai Gerindra bisa lebih banyak bisa duduk dibangku DPRK dan DPRA di Aceh.

3. Dua atau beberapa partai yang mempunyai kepentingan yang sama.

sudah terlihat dengan jelas apa yang diinginkan saat berkoalisi baik hanya dua partai atau lebih, yaitu mengharapkan kemenangan yang lebih mudah. Berkoalisi nya beberapa partai ini tidak menjamin akan menang, semakin banyak partai berkoalisi belum tentu pasangan yang diusung akan menang, ini terbukti dari perebutan orang no satu di Jakarta, dimana pada saat itu pasangan petahana pak Fauzi kalah dengan pak Jokowi padahal calon Fauzi bowo didukung oleh beberapa parpol yang lebih banyak dari pasangan Jokowi-Ahok.

Hal yang sama pun terjadi dipemilu Presiden tahun 2014 koalisi Prabowo lebih banyak dari koalisi Jokowi, walaupun koalisi Prabowo lebih banyak kenyataannya Prabowo kalah, jadi banyak atau tidaknya partai berkoalisi tidak menjamin calon yang diusung akan menang, yang menentukan menang dan kalhnya adalah mesin partai, program, dan cara media membranding calon. Di aceh partai pendukung Prabowo ada 8 partai antara lain, Partai Gerindra, Partai Aceh, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.

Jika dilihat koalisi yang dilakukan di Aceh memang ada perintah dari ketua partai pusat, kepentingan dari koalisi ini adalah merebut jabatan orang no satu di Indonesia, setelah mendapatkan jabatan menjadi Presiden, maka deal-deal politik yang telah dilakukan akan dilaksanaka, janji politik dengan Partai Aceh adalah penerapan UU PA, dengan partai lain mungkin saja ada perjanjian jika Prabowo menjadi Presiden jabatan seperti menteri, dan jabatan strategis lainnya akan diberikan kepada partai pendukung.

Koalisi karena mempunyai kepentingan yang sama mungkin sesuai untuk menggambarkan koalisi Partai Gerindra dengan Partai Aceh. Tidak heran parpol nasional akan berkoalisi dengan partai manapun yang bisa menguntungkan, tidak peduli ideologi berbeda yang penting saling menguntungkan, tidak jarang ditemui parpol ditingkat pemerintah pusat sering berbeda pandangan dan tidak pernah akur

pada saat pemilu di daerah akan berkoalisi. Hal ini bisa terjadi karena parpol tidak mengedepankan ideologi tetapi kepentingan diatas segalanya, sampai ada perkataan tidak ada teman yang abadi di dalam politik yang ada kepentingan abadi.

Koalisi yang dilakukan ini adalah koalisi atas kepentingan yang sama, yaitu seperti orasi yang disampaikan Prabowo saat di Aceh Prabowo meminta maaf atas kasus yang dilakukan anggota nya pada kejadian di Aceh pada masa orde baru, pada masa itu memang terjadi konflik antara kelompok Prabowo dimana pada masa itu Prabowo menjabat komandan jendral kopassus dan melawan Gerakan Aceh Merdeka yang sekarang ini beberapa anggotanya bergabung di Partai Aceh, tetapi sekarang bersatu demi kepentingan rakyat banyak dan terus menjaga perdamaian yang hakiki.

Dari berita online yang beredar pihak ketua umum Partai Aceh menerima uang sebesar 50 M, dari wawancara dengan mantan ketua Partai Gerindra Aceh utara beliau mengatakan, “ kami tidak tau mengenai penerimaan uang sebesar 50 miliar, walaupun itu adalah hak pribadi dari Prabowo.” Berita langsung ditepis oleh pihak Muzakir Manaf atau yang sering disapa mualem.

Dari surat kabar online Serambinews, Barisan Pendukung Partai Aceh (BPPA) yaitu pada konferensi pers di Banda Aceh yang diwakili Azmi mengatakan, “ kami meminta pertanggung jawaban Muzakir atas tidak berkompromi mengenai koalisi dengan Gerindra,

meminta pertanggung jawaban Muzakir atas penerimaan uang kurang lebih 50 miliar dari Gerindra, dan pemecatan petugas Partai Aceh.

4. Meringankan biaya kampanye.

Dari hasil pengamatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dana kampanye Prabowo sebesar 166,6 miliar dan untuk Jokowi lebih besar yaitu 312 miliar, hal ini terjadi karena koalisi dari Jokowi lebih sedikit dari Prabowo sehingga dana kampanye akan lebih besar, padahal jika dilihat Jokowi pada saat itu sedang terkenal karena program-program yang dilakukan saat masih menjadi walikota solo, seharusnya lebih mudah memenangkan dan mengenalkan Jokowi dari pada Prabowo, namun tenar saja tidak cukup karena Partai perlu membayar saksi disetiap TPS, biaya atribut kampanye, dan hal lain lagi yang memerlukan dana yang besar.

Jadi dengan banyaknya suatu koalisi biasanya akan berbanding lurus dengan dana, jika koalisi dilakukan dengan banyak partai sudah pasti biaya kampanye yang dikeluarkan oleh pengusung akan lebih sedikit, karena ada pembagian dana dan tugas sehingga partai pengusung akan lebih ringan dalam kampanye. Sebaliknya jika koalisi dengan beberapa partai saja maka dan kampanye akan lebih banyak dikeluarkan oleh partai pengusung karena dana kampanye yang besar tidak bisa diperkecil seperti koalisi dengan banyak partai.

Bisa dilihat partai Gerindra lebih sedikit memakan biaya karena berkoalisi lebih banyak partai disbanding pak Jokowi, dengan biaya yang setengah dari biaya yang Jokowi keluarkan Prabowo bisa merebut suara yang hamper bisa mengalahkan Jokowi, sayangnya mesin partai yang ada disetiap daerah tidak bekerja secara maksimal. Banyak suatu partai berkoalisi belum tentu berhasil memenangkan pemilu, karena yang menentukan menang kalah bukanlah koalisi, yaitu elit poltik dan mesin partai yang berad disetiap daerah.

Suatu acara disebuah stasiun tv swasta membahas mengenai berapa biaya untuk kampanye, mulai dari iklan, cetak baju, saksi dan hal lain sebagai nya, bisa diperkirakan begitu banyak harus dikeluarkan jika partai tidak berkoalisi. Harapannya dengan berkoalisi akan meringankan biaya kampanye. Yang ditakutkan adalah saat berkoalisi dengan berlandaskan uang maka saat yang diusung menang maka tidak bisa bebas melakukan yang baik untuk rakyatnya jika partai yang memberikan uang paling banyak tidak mendapatkan keuntungan.

Itulah yang dilakukan Partai Gerindra melihat peluang yang besar jika bisa berkoalisi dengan Partai Aceh, dimana Partai Aceh pada saat itu sebagai Partai penguasa dan juga Partai Aceh tidak menginginkan berkoalisi dengan Partai PDIP, karena Jokowi dianggap hanyalah boneka atau remot dari elit-elit PDI-P, begitulah yang dikatakan oleh ketua umum Partai Aceh di surat berita online merdeka.com.

Walaupun menganggap Jokowi sebagai remote dari PDI-p nyatanya Jokowi lebih disenangi oleh masyarakat Indonesia, sehingga Prabowo gagal menjadi Presiden. Pernyataan yang dilontarkan oleh ketua umum Partai Aceh tentang Jokowi rakyat Indonesia tidak melihat begitu, beberapa rakyat melihat Jokowi sosok yang merakyat sehingga cocok menjadi Presiden Indonesia, dan yang mempopulerkan Jokowi seperti itu adalah media.

Sangat disayangkan Prabowo tidak berhasil menjadi Presiden, sehingga perjanjian yang menguntungkan Partai Aceh dan rakyat Aceh belum dapat terwujud. Saat wawancara dengan mantan tim pemenangan Prabowo dari Partai Aceh mengatakan, “Jokowi terpilih menjadi Presiden tidak ada perubahan yang sangat menguntungkan rakyat Aceh, karena UU PA masih belum bisa diwujudkan secara keseluruhan.” UU PA dibentuk untuk membuat Aceh berdamai dengan pusat, UU PA adalah turunan dari perjanjian Helsinki di Finlandia yang berhasil membuat Aceh damai dilakukan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla atau SBY-JK.

Perjanjian Helsinki adalah hasil ke 3 setelah perjanjian yang ada pada masa Habibie dan Megawati, 2 perjanjian sebelumnya gagal membuat GAM untuk tidak meminta merdeka. Namun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla barulah perundingan dilakukan secara komprehensif dan menggunakan dialog secara penuh. Pada masa pemerintahan sebelum SBY-JK otonomi

khusus yang ditawarkan hanya sepihak dari pemerintah tetapi pada masa SBY barulah mendapatkan titik temu kedua belah pihak. Sehingga perjanjian itu dituangkan didalam UU PA, maka peneliti sangat menyayangkan jika UU PA tidak bisa terlaksana dengan semestinya.